

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Masyarakat Desa Paga telah lama hidup dalam sistem budaya patriarki yang melegitimasi praktik dominasi terhadap perempuan melalui distorsi sistemik yang represif. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan, sedangkan perempuan diposisikan lebih rendah atau subordinatif. Distingsi ini termanifestasi dalam pembagian peran gender yang timpang, juga dalam struktur sosial, hukum adat, dan kebiasaan hidup harian. Laki-laki mendominasi ranah publik, seperti politik, ekonomi, dan agama, sedangkan perempuan dibatasi pada wilayah domestik yang dianggap sebagai “kodrat” mereka. Pembagian ini diperkuat oleh legitimasi adat, agama, dan negara, yang kemudian menciptakan ketidakadilan sistemik yang akut. Tatahan sosial ini menginternalisasi budaya yang bersifat *phallo-centris*, di mana laki-laki mempunyai kemudahan untuk mengakses *material basic of power*¹, suatu sistem nilai yang menempatkan maskulinitas sebagai norma sentral dan ukuran superioritas. Akses tersebut dimulai sejak usia dini, bahkan sebelum seorang individu dapat memilih bentuk sosialisasi mana yang cukup memadai untuk dirinya. Proses pengkondisian ini berjalan terus-menerus sehingga membentuk *common-sense* tentang kebenaran sebagai laki-laki dan perempuan. Termasuk didalamnya kebenaran ruang sosial, cara berpakaian, dan perilaku. Siapapun yang mengabaikan kebenaran tersebut akan mendapat sanksi sosial. Karena itu, satu-satunya perempuan yang diakui dalam masyarakat patriarki adalah perempuan yang memiliki karakter maskulin, yaitu perempuan yang dipandang dari sudut pandang laki-laki. Tipe perempuan ini sering kali diidentifikasi sebagai sosok yang menarik secara fisik, dengan tubuh yang ideal, sebagai seorang ibu yang menyusui anak,

¹ M. Munandar Sualement, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Bandung, PT Refika Aditama, 2019), hlm. 17.

sebagai ibu rumah tangga yang melayani suami, dan sebagai individu yang gemar berbelanja.²

Realitas dominatif pada masyarakat Paga muncul dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan. Marginalisasi perempuan terlihat jelas dalam dinamika pembagian harta benda, di mana hanya anak laki-laki yang berhak memperoleh harta keluarga. Perempuan yang menikah dianggap telah menjadi milik suami dan keluarganya, sehingga secara hukum adat mereka kehilangan hak atas warisan orang tuanya. Begitu pun anak perempuan yang memilih untuk tidak menikah tetap tinggal di rumah orang tuanya, tetapi ia tetap tidak berhak mendapatkan warisan. Selain itu, praktik domestikasi memaksa perempuan menanggung beban ganda akibat konflik peran dalam keluarga dan masyarakat (hal yang biasanya dialami oleh perempuan karier).

Dominasi pun tidak jarang berujung pada aksi kekerasan terhadap perempuan, yang melecehkan hak dan martabatnya. Tidak dapat disangkal bahwa dominasi ini berakar pada stereotipe-stereotipe yang diberikan kepada perempuan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Mereka dianggap dan dicap sebagai manusia lemah, pelengkap, tidak rasional, serta sejumlah term lainnya yang semakin memojokkan perempuan pada situasi yang tidak menguntungkan. Anggapan buruk yang berlaku dalam masyarakat ini pada gilirannya membentuk sistem kultur yang tidak adil dan menindas. Anggapan ini tampak nyata melalui kekerasan simbolik dalam mitos-mitos (seperti anggapan perempuan itu kotor) yang menjadi basis legitimasi normatif untuk membatasi partisipasi sosial perempuan dalam ritual adat.

Kelanggengan praktik dominasi dan berkembangnya prasangka-prasangka negatif terhadap perempuan dalam masyarakat Paga juga dipengaruhi oleh beberapa asumsi mendasar. *Pertama*, kesepakatan-kesepakatan sosial yang sesungguhnya hanya menguntungkan kepentingan kelompok dominan, cenderung dianggap mewakili kepentingan semua orang. *Kedua*, kultur hegemonis seperti ini merupakan bagian dari pemikiran sehari-hari dan cenderung diterima apa adanya (*taken for granted*) sebagai sesuatu yang memang demikianlah semestinya. *Ketiga*, dengan mengabaikan kontradiksi yang sangat nyata antara kepentingan kelompok

² Isyatusy Syarifah et al., "Deconstruction of Women's Beauty Standard on Social Media: An Analysis Corresponding Author*," *Science and Education* 1, no. July (2022): 727–33.

yang dominan dengan kelompok subordinat, kultur seperti ini dianggap sebagai penjamin kohesi dan kerja sama sosial, sebab jika tidak demikian, yang terjadi adalah justru suatu konflik.³

Berbagai praktik dominasi dan ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam masyarakat Paga, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak individual sekaligus bentuk pengakuan yang keliru (*misrecognition*).⁴ Norma-norma adat yang berlaku tidak hanya meminggirkan perempuan secara struktural, tetapi juga mendorong internalisasi inferioritas, di mana perempuan memandang diri mereka sekadar sebagai instrumen pemenuh kepentingan kelompok dominan (laki-laki). Proses internalisasi ini melahirkan kesadaran palsu (*false consciousness*) yang mempersepsi ketimpangan gender sebagai sesuatu yang alamiah, bahkan dianggap sakral. Akibatnya, perempuan terperangkap dalam konformitas buta terhadap budaya patriarki, tanpa ruang untuk mengembangkan dan menyuarakan kesadaran kritis terhadap relasi kuasa hirarki yang represif dalam hidup sehari-hari.

Ketimpangan dalam budaya patriarki ini dikritisi oleh penulis melalui teori asal Kanada asal Kanada, sebagai bentuk kesenjangan antara identitas dan moralitas dalam diri perempuan. Identitas perempuan adalah pribadi yang bebas dan mempunyai martabat yang sama dengan laki-laki. Pengakuan akan kesamaan ini muncul seiring perkembangan konsep modern tentang martabat (*dignity*) yang lebih universal dan egalitarian, di mana martabat perempuan dianggap merupakan sesuatu yang inheren (bawaan).⁵ Karena kesamaan ini, perempuan pantas mendapat perlakuan egaliter sebagaimana perlakuan yang diberikan terhadap laki-laki. Perempuan tidak boleh terbelenggu oleh instrumen represif mana pun, entah itu budaya, etnis, maupun regulasi negara.

Guna mendukung perwujudan jati diri yang otentik, Taylor juga memandang penting adanya legitimasi intersubjektif terhadap perempuan, baik itu melalui pengakuan sosial, maupun melalui dialog kritis. Untuk itu, Charles Taylor

³ Muhadjir Darwin, "Maskulinitas: Posisi laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis" (*ms*). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1999), hlm. 1-2.

⁴ Charles Taylor, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, 1994.

⁵ Charles Taylor, "The Politics of Recognition," dalam Amy Gutman (ed.), *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition* (New Jersey: Princeton University Press, 1994), hlm. 25.

memandang adanya korelasi esensial antara pengakuan dan identitas. Gagasan utamanya ialah identitas seseorang sebagian besar terbentuk melalui pengakuan (atau ketiadaan pengakuan), yang sering kali dipengaruhi oleh kesalahan persepsi dari orang lain. Akibatnya, seseorang atau suatu kelompok dapat mengalami kerusakan nyata atau distorsi identitas apabila masyarakat di sekitarnya memberikan citra yang merendahkan, membatasi, atau merusak harga diri mereka. Ketidakpedulian atau pengakuan yang keliru dapat menyebabkan kerugian psikologis dan bahkan menjadi alat penindasan, mengurung seseorang dalam cara hidup yang tidak autentik, terdistorsi, dan terbatas.⁶

Tesis di atas hendak menegaskan bahwa berkembang atau tidaknya identitas seseorang sangatlah tergantung pada pengakuan atau penolakan dari orang lain. Orang ataupun kelompok tertentu bisa mengalami kehancuran, jika identitasnya tidak diakui atau bahkan ditolak oleh masyarakat sekitarnya. Penolakan ini menghasilkan gambaran yang jelek tentang orang maupun masyarakat yang ditolak. Gambaran ini tidak hanya ada dalam pikiran masyarakat yang menolaknya, tetapi juga ada dalam pikiran orang-orang yang ditolak. Akibatnya, gambaran diri (*self-image*) orang-orang yang ditolak menjadi negatif.

Bertolak dari tesis ini, Charles Taylor secara implisit sependapat bahwa kultur patriarki sebagai aktualisasi pengakuan yang keliru terhadap perempuan sehingga perempuan mengalami penderitaan mental atau terjebak dalam gambaran diri yang salah, distorsif, dan reduktif. Oleh karena itu, Taylor mengupayakan suatu pendekatan transformatif yang bersifat multidimensi. Pada tingkat epistemik, diperlukan dekonstruksi terhadap paradigma opresif melalui refleksi filosofis dan dialog kritis dengan kelompok dominan. Pada ranah etis, perjuangan itu harus diupayakan melalui seruan moral yang menekankan prinsip martabat manusia universal. Sementara, pada tingkat praktis, transformasi ini memerlukan instrumen yuridis yang menginstitusionalisasi pengakuan egaliter.

Dalam perspektif Taylor, pendekatan epistemik ditunjukkan melalui pengakuan sosio-kultural untuk mendekonstruksi hirarki tradisional yang

⁶ Charles Taylor, "The Politics of Recognition," dalam Amy Gutman (ed.), *op. cit.*, hlm. 25.

mengancam identitas perempuan.⁷ Pendekatan ini bertolak dari dasar pemahaman Taylor bahwa identitas seseorang tidak dibentuk dalam kesendirian, melainkan melalui relasi dengan *significant others*, seperti keluarga, pasangan hidup, komunitas, dan institusi sosial yang sering kali mereproduksi nilai patriarki yang restriktif. Karena itu, langkah solutif berikut ini diupayakan untuk memperkuat identitas perempuan dalam masyarakat patriarki, yakni dengan membangun kesadaran kritis melalui interaksi dengan *significant others*, yang memiliki pandangan yang lebih progresif, suportif, dan inklusif terhadap kesetaraan gender. Upaya ini dapat digalakkan melalui transformasi pola asuh dalam keluarga, reorientasi sistem pendidikan, dan renegotiasi norma-norma budaya. Dalam konteks masyarakat Paga, langkah konkret dapat berupa pembentukan forum dialog gender (laki-laki dan perempuan), dan dialog antargenerasi (orang tua dan orang muda) yang terbuka pada deliberasi kultur untuk reinterpretasi tradisi atau norma kolektif yang diskriminatif.

Pada tataran etis, penguatan identitas perempuan diusahakan dengan tuntutan koeksistensi egaliter, yang mengharuskan setiap individu atau kelompok agar hidup berdampingan secara harmonis dan setara, tanpa adanya hirarki kekuasaan atau dominasi laki-laki melalui norma kolektif yang mendiskreditkan potensi alamiah individu atau kelompok tertentu. Karena itu, penulis menggunakan pisau analisis kolaboratif antara konsepsi pengakuan melalui dialog intersubjektif oleh Taylor dan pendekatan kapabilitas (*capabilities approach*) dari Nussbaum. Pendekatan ini menegaskan, “Pemenuhan hak-hak dasar individu merupakan prasyarat untuk membangun komunitas yang sehat.”⁸ Ia berargumen bahwa nilai-nilai kolektif tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk melanggar kapabilitas dasar manusia, semisal tuntutan akan kebebasan, dan perlakuan yang setara. Sintesis dari dua pemikiran ini menawarkan pentingnya relasi resiprokal melalui tindakan solidaritas guna mengkonstruksi pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan, dan menawarkan *internal criticism* sebagai transformasi

⁷ Dikshit Sarma Bhagabati, “Human Rights as a Claim for Recognition: Towards an Ecumenical Anthropology of Dignity and Personhood,” *Thesis Eleven*, 2025, 1–22, <https://atauataudoi.org/atau10.1177/atau07255136241308888>.

⁸ Martha Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (London: Cambridge University Press, 2012), <https://atauataudoi.org/atau10.1017/atauCBO9780511841286>.

imanen, di mana semua anggota komunitas sosial (laki-laki dan perempuan) secara kritis merefleksikan dan merevisi norma-norma kolektif yang tidak adil dengan tetap berpegang pada prinsip kapabilitas dasar.

5.2 Usul Saran

5.2.1 Kaum Perempuan di Paga

Kaum perempuan masyarakat Paga perlu memiliki keberanian untuk menunjukkan kemampuan dirinya dan mampu menelisik konsep-konsep budaya serta mampu untuk membangun sikap kritis terhadap konstruksi budaya yang ada di dalam masyarakat. Membangun sikap kritis bukan berarti mencurigai konstruksi budaya dan memberontak terhadap kaum laki-laki, melainkan berusaha untuk membangun dialog yang baik agar tercipta pengakuan benar yang mendukung perkembangan hidup seorang perempuan. Oleh karena itu, kaum perempuan memiliki hak untuk mendalami dan mengkritik berbagai norma dan praktik budaya yang distorsif.

5.2.2 Para Tokoh Adat dan Masyarakat di Paga

Para tokoh adat dan masyarakat Paga perlu memiliki paradigma yang baru dalam memandang dan memperlakukan kaum perempuan baik di dalam konteks keluarga maupun dalam konteks sosial. Para tokoh adat perlu memberikan ruang yang luas bagi kaum perempuan untuk mengekspresikan diri dan kemampuannya di tengah masyarakat. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui memberikan kepercayaan untuk terlibat dalam urusan adat-istiadat.

5.2.3 Gereja Keuskupan Maumare

Gereja sebagai institusi moral perlu menggiatkan model pastoral partisipatif-inklusif yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Partisipasi yang dimaksud, semisal terlibat dalam proses pengambilan keputusan, masuk dalam kelompok-kelompok perempuan (misalnya: Legio Maria, WKRI, PSE), yang memberi ruang bagi perempuan untuk berdoa, berdiskusi, dan mengembangkan diri. Gereja juga perlu mengupayakan musyawarah pastoral yang secara khusus menyoroti pentingnya peran perempuan dalam kehidupan gerejawi, budaya, maupun masyarakat.

5.2.4 Ordo Karmel

Para imam Ordo Karmel yang berkarya di Paroki Salib Suci Maulo'o, entah sebagai pastor paroki, maupun pastor rekan perlu mengupayakan pastoral keluarga dengan berkonsentrasi pada konseling pernikahan dan konflik keluarga yang sensitif gender. Dalam hal ini, imam dituntut untuk mengetahui secara pasti akar konflik gender di Paga, dan menggiatkan katekese yang berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abbey, Ruth. "Timely Meditations in an Untimely Mode," dalam Ruth Abbey (ed.), *Charles Taylor* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- Akhtar, Salman. *Silent Virtues: Patience, Curiosity, Privacy, Intimacy, Humility, and Dignity*. New York: Routledge, 2019.
- Arndt, Paul. *DuA NggaE, Wujud Tertinggi dan Upacara Keagamaan di Wilayah Lio*. Maumere: Puslit Candraditya, 2002.
- Arofah, Laelatul dkk., *Media Berwawasan Gender*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Baghi, Felix (ed.). *Kewarganegaraan Demokratis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996.
- Beauvoir, Simone. *Extracts from The Second Sex*. London: Random House, 2015.
- Beding, Michael dan S. Indah Lestari Bedding, *Pelangi Sikka*. Maumere: Pemda Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2001.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Bhasin, Kamla. *Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.
- Clark, Francis X. *Gereja Katolik di Asia: Sebuah Pengantar*. Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2001.
- Darwin, Muhadjir. "Maskulinitas: Posisi laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkis" (ms). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1999.
- De Jong, Willemijn. *Luka, Lawo, Ngawu: Kekayaan Kain Tenunan dan Belis di Wilayah Lio, Flores Tengah*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
- Debes, Remy (ed.). *Dignity: a History*. New York: Oxford University Press, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003.
- Dosi, Eduardus. *Media Massa dalam Jaring Kekuasaan*. Maumere: Ledalero, 2012.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1984.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- From, Erich. "Watak Sosial: Permasalahan dan Metodologinya", dalam Agus Cremers (Penyunt.), *Masyarakat Bebas Agresivitas: Bunga Rampai Karya Erich Fromm*. Maumere: Ledalero, 2004.
- Gusti Madung, Otto. "Politik Diferensiasi: Memahami Konsep Multikulturalisme Charles Taylor," *Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi*, 2012.
- . *Negara, Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Hadi Saptiawan, Itsna dan Sugihastuti. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Haryatmoko. *Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- M. Clifford, Anne. *Memperkenalkan Teologi Feminis*, penerj. Yosef M. Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- M. Koesing, Roger. *Antropologi Budaya*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Munandar Sualeman, M. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung, PT Refika Aditama, 2019.
- Naisbitt, John. *Megatrends Asia*, penerj. Syamsul Wardi. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Orinbao, Sareng. *Tata Berladang Tradisional dan Pertanian Rasional Suku Bangsa Lio*. Maumere: Penerbit Ledalero, 1992.
- Palulungan, Lusia, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufuran, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesenjangan Gender, BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*, 2020.
- Parekh, Bhiku. *Rethinking Multiculturalism*, penerj. Bambang Kukuh Adi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Sadli, Saparina. *Berbeda tetapi Satu*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Sindhunata. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.

Sulaeman, Munandar, dkk., *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.

Suseno, Franz-Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1988.

Takwin, Bagus. *Akar-Akar Ideologi*. Yogyakarta: Jalasutra, 2003.

Taylor, Charles. "The Politics of Recognition," dalam Amy Gutman (ed.), *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton University Press, 1994.

-----, *A Secular Age*. London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007.

II. JURNAL

Alidu, Shafiu. "Exploring the Mechanisms Linking Self-Recognition, Cultural Identity, and External Respect: A Theoretical Inquiry." *Journal of Ibn Haldun Studies, Ibn Haldun University* 9, no. 1 (2024): 101–9. <https://ata.ataudoi.org/doi/10.36657/atauihcd.2024.120>.

Apple, Michael. "Paulo Freire, Critical Pedagogy and the Tasks of the Critical Scholar/Activist." *Revista Científica E-Curriculum* 7, no. February (2011): 1–21.

Brookfield, Stephen. "From the SAGE Social Science Collections. All Rights." *Hispanic Journal of Behavioral Sciences* 9, no. 2 (1984): 183–205.

Connell, R. W. *Masculinities*. Cambridge: Polity Press, 1995. <https://ata.atauarchive.org/ataembed/ata/masculinities0000conn%22width=%22560%22height=%22384%22frameborder=%220%22webkitallowfullscreen=%22true%22mozallowfullscreen=%22true%22allowfullscreen%3E%3C%3E%3C%3E>.

Daigle, Christine. *The Ethics of Authenticity. Reading Sartre: On Phenomenology and Existentialism*, 2010. <https://ata.ataudoi.org/doi/10.5840/atautraddisc1992/ata19931916>.

- Douglas, Giles. "Rethinking Misrecognition and Struggles for Recognition: Critical Theory beyond Honneth," no. September (2020).
- Gusti Madung, Otto. "Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural", *Diskursus Jurnal Filsafat dan Teologi STFK Driyarkara*, 11:2 (2012).
- Hermanto Candra, Prikardus. "Kritik Feminisme Postkolonial untuk Membongkar Kultur Patriarki dalam Budaya Manggarai", *Jurnal pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11:1 (Januari 2019).
- Hermanto, Rifka annisa. "Indonesian Digital Feminist Activism Bridging Global-Local Feminism Discourse: Textual Network Analysis of Jakarta Feminist." *Jurnal Sosioteknologi* 21, no. 2 (2022). <https://atauataudoi.org/atau10.5614/atausostek.itbj.2022.21.2.1>.
- Hirvonen, Onni. "Democratic Institutions and Recognition of Individual Identities." *Thesis Eleven* 134, no. 1 (2016): 28–41. <https://atauataudoi.org/atau10.1177/atau0725513616646023>.
- Levey, Geoffrey Brahm. "Autonomy and Multiculturalism." *The Routledge Handbook of Autonomy*, no. March (2022): 381–91. <https://atauataudoi.org/atau10.4324/atau9780429290411-40>.
- Maigari, Peter Piringkwap. "A Critique of Charles Taylor's Theory of Recognition." *SOCIETIES: Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2021): 2021. <https://atauatauojs.unm.ac.id/atausocieties/atauindex>.
- Martineau, Wendy, Nasar Meer, and Simon Thompson. "Theory and Practice in the Politics of Recognition and Misrecognition." *Res Publica* 18, no. 1 (2012): 1–9. <https://atauataudoi.org/atau10.1007/ataus11158-012-9181-7>.
- McQueen, Paddy. "Post-Identity Politics and the Social Weightlessness of Radical Gender Theory." *Thesis Eleven* 134, no. 1 (2016): 73–88. <https://atauataudoi.org/atau10.1177/atau0725513616646024>.
- Morrison, R. B. "Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist." *The Modern Schoolman* 13, no. 2 (1936): 43–43. <https://atauataudoi.org/atau10.5840/ataschoolman19361328>.

- Mutiah, Riska. "Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 58–74.
<https://doi.org/10.20414/atau.komunitas.v10i1.1191>.
- Nussbaum, Martha. *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. London: Cambridge University Press, 2012.
<https://doi.org/10.1017/atau.CBO9780511841286>.
- Pranowo, Yogie. "Identitas Perempuan Dalam Budaya Patriarkis: Sebuah Kajian Tentang Feminisme Eksistensialis Nawal El Sa'adawi Dalam Novel 'Perempuan Di Titik Nol.'" *Jurnal MELINTAS* 29, no. 1 (2013): 56–78.
- Raisa, Zakiyah, Agnia Hani, Zahra Davika, and Ahmad Ramdani. "Diskursus Publik Dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 2 (2024): 1–9.
<https://doi.org/10.59818/atau.jps.v3i2.807>.
- Rousseau, Jean Jacques. "A Discourse on a Subject Proposed by the Academy of Dijon: What Is the Origin of Inequality among Men, and Is It Authorised by Natural Law?" *The Social Contract and Discourses*, 1754, 1–44.
- Sarma Bhagabati, Dikshit. "Human Rights as a Claim for Recognition: Towards an Ecumenical Anthropology of Dignity and Personhood." *Thesis Eleven*, 2025, 1–22. <https://doi.org/10.1177/atau.07255136241308888>.
- Smith, Nicholas H. *Charles Taylor: Meaning, Morals, and Modernity*. Edited by Polity Press. Cambridge: Blackwell Publisher, 2002.
- Syarifah, Isyatusy, Dewi Putri Nurjanah, Nur Atikah, Ahmad Zadul Ma, ad Syarif, Gadjah Mada, and Uin KH Achmad Siddiq Jember. "Deconstruction of Women's Beauty Standard on Social Media: An Analysis Corresponding Author*." *Science and Education* 1, no. July (2022): 727–33.
- Taylor, Charles. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, 1994.
- Wattimena, Reza A A. "Menuju Indonesia yang Bermakna: Analisis Tekstual-Empiris Terhadap Pemikiran Charles Taylor Tentang Politik Pengakuan Dan

Multikulturalisme, Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia.” *Studia Philosophica et Theologica* 11, no. 1 (2017): 1–30.
<https://ata.atauejournal.stftws.ac.id/atauindex.php/atauarticle/atauview/atau73>.

Zhafarina, Adlia Nur, Silvia Diah Puspitaningrum, Fauzul Hadi Aria Langga, and Reni Kartika. “Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Perempuan Berdaya.” *Journal of Innovation in Community Empowerment* 5, no. 1 (2023): 13–21.
<https://ata.ataudoi.org/atau10.30989/atau/atauice.v5i1.884>.

III. INTERNET

<https://ata.ataurumahfilsafat.com/atau2010/atau11/atau21/atau/multikulturalisme-dan-politik-pengakuan/atau>

<https://ata.atauwww.britannica.com/atau/biography/atau/Charles-Taylor>

Wikipedia, “Patriarki”, <https://ata.id.m.wikipedia.org/atau/wiki/atau/Patriarki>

Adi Briantika, Mohammad Barnie, Dieqy Hasby Widhana, “Siklus Rasisime terhadap Mahasiswa Papua”, <https://ata.atautirto.id/atau/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua/atau>,

<https://ata.atauwww.tempo.co/atau/abc/atau/5690/atau/saya-merasa-bersalah-tujuh-warga-papua-divonis-tuduhan-makar>

http://ata.atauwww.stopvaw.org/atau/declaration_on_the_elimination_of_violence_against_women

MaPPI FHUI, “Kekerasan Seksual”, <http://ata.ataumappifhui.org/atau/wp-content/atau/uploads/atau/2018/atau/10/atau/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>,

Avigail Eisenberg et al., “Recognition versus Self-Determination: Dilemmas of Emancipatory Politics,” 2014, 5, <https://ata.ataubooks.google.fr/atau/books?id=-P0hAwAAQBAJ>.

IV. WAWANCARA

Berkhmans Mangu, Yohanes. Wawancara, 11 November 2024.

Bili Bulu, Damianus. Wawancara, 6 Januari 2025.

Doi, Petrus. Wawancara, 12 November 2024.

Dule, Martina. Wawancara, 12 November 2024

Igo, Beatrix. Wawancara, 11 November 2025.

Nake, Agata. Wawancara, 7 Januari 2025.

Ndari, Yohanes. Wawancara, 10 November 2024.

Ndori, Yulius. Wawancara, 7 Januari 2025.

Ngaga Wara, Ardiardus. Wawancara, 6 Januari 2025.

T. L. Lemba, Tibur. Wawancara, 6 Januari 2025.

Toda, Frans. Wawancara, 13 November 2024.

V. DOKUMEN

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, pasal 30, No. 3.